



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran



Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 5);
 - b. Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 18);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah Rp.1.680.655.817.673,00 berkurang sejumlah Rp.72.013.486.963,00 sehingga menjadi Rp.1.608.642.330.710,00.

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 159.105.340.440,00
b. Dana Perimbangan	
a) Semula	Rp. 937.745.247.176,00
b) Bertambah	Rp. 170.194.421.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.107.939.668.176,00</u>
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a) Semula	Rp. 501.482.823.963,00
b) Berkurang	<u>Rp. 242.207.907.963,00</u>



Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 259.274.916.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.526.319.924.616,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula

Rp. 711.447.449.550,00

b) Berkurang

Rp. 37.374.729.197,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 674.072.720.353,00

2. Belanja Bunga

Rp. 45.000.000,00

3. Belanja Hibah

a) Semula

Rp. 61.182.494.300,00

b) Bertambah

Rp. 7.913.819.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

Rp. 69.096.313.800,00

4. Belanja Bantuan Sosial

Rp. 17.413.350.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Rp. 230.980.477.414,00

6. Belanja Tidak Terduga

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

Rp. 993.607.861.567,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula

Rp. 69.721.049.167,00

b) Bertambah

Rp. 2.061.430.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 71.782.479.667,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula

Rp. 301.055.318.917,00

b) Berkurang

Rp. 3.979.367.676,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Rp. 297.075.951.241,00

3. Belanja Modal

a. Semula

Rp. 282.724.478.325,00

b. Berkurang

Rp. 40.634.640.090,00



Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 242.089.838.235,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 610.948.269.143,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.604.556.130.710,00
Defisit	Rp. (78.236.206.094,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 82.322.406.094,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 4.086.200.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp. 78.236.206.094,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 22